

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS
ANAK DI BAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
(Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD PAHRUR ROZI
208520009



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS
ANAK DI BAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL
KOTA MEDAN
(Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

AHMAD PAHRUR ROZI

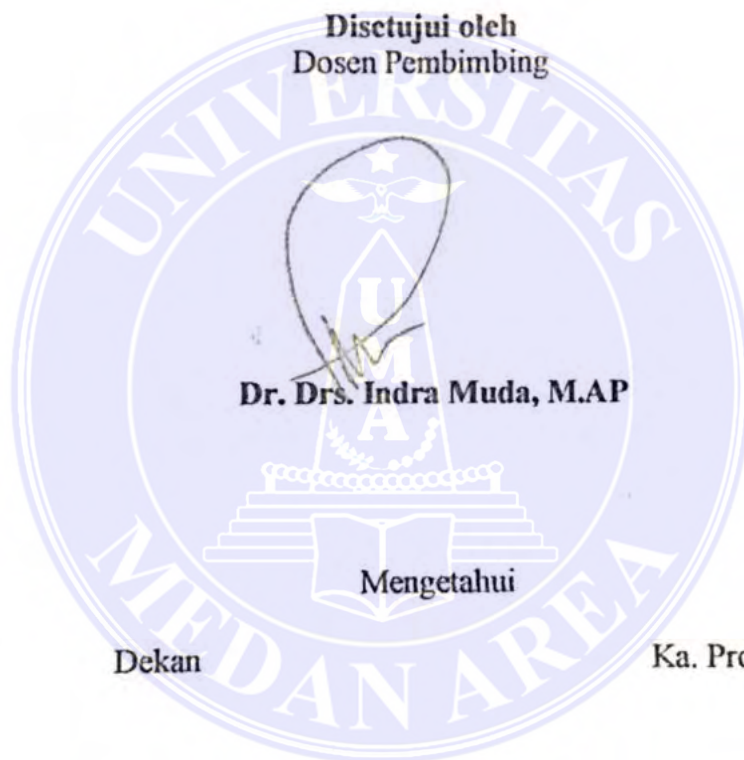
208520009

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : AHMAD PAHRUR ROZI
NPM : 208520009
JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI
PENGEMIS ANAK DI BAWAH UMUR PADA DINAS
SOSIAL KOTA MEDAN (STUDI KASUS EKSPLOITASI
ANAK DI BAWAH UMUR)

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing

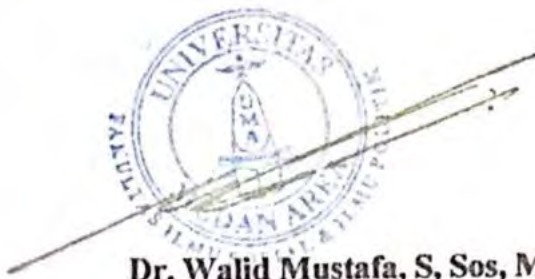


Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi



Dr. Walid Mustafa, S, Sos, M.I.P



Dr. Drs. Indra Muda, M.AP

Tanggal Lulus : 11 September 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 11 September 2024



Ahmad Pahrur Rozi
Npm. 208520009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Pahrur Rozi
Npm : 208520009
Program Studi : Administrasi publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area. **Hak Bebas Royalti Nonekluksif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Di Bawah Umur Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur) " beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas Royalti Nonekklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkan/media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebelumnya.

Medan, 11 Oktober 2024

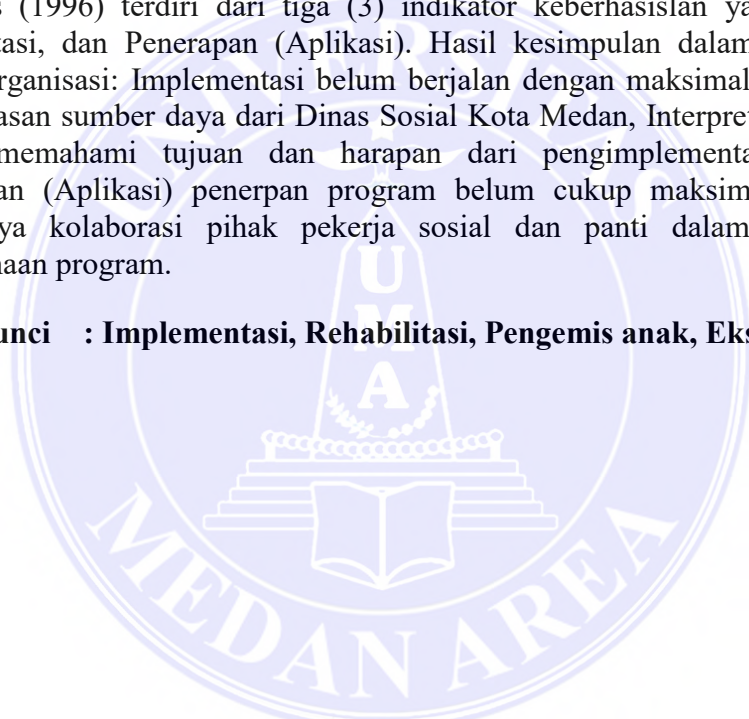


Ahmad Pahrur Rozi
Npm. 208520009

ABSTRAK

Rehabilitasi sosial merupakan sebuah program yang dilakukan dalam membantu dan mendukung individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dalam memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka terkhususnya terhadap para golongan pengemis anak. Dengan adanya Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan program Rehabilitasi Sosial Anak seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menekan laju tingkat anak yang bekerja sebagai pengemis ini sehingga terciptanya kesejahteraan sosial terhadap anak-anak tersebut maupun lingkup publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur dalam (studi kasus eksploitasi anak di bawah umur) serta mengetahui faktor penghambat program. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif . penelitian menggunakan teori Implementasi Program Charles O Jones (1996) terdiri dari tiga (3) indikator keberhasilan yaitu Organisasi, Interpretasi, dan Penerapan (Aplikasi). Hasil kesimpulan dalam penelitian ini ialah, Organisasi: Implementasi belum berjalan dengan maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya dari Dinas Sosial Kota Medan, Interpretasi: sudah baik dalam memahami tujuan dan harapan dari pengimplementasian program, Penerapan (Aplikasi) penerapan program belum cukup maksimal dikarenakan kurangnya kolaborasi pihak pekerja sosial dan panti dalam mendampingi pelaksanaan program.

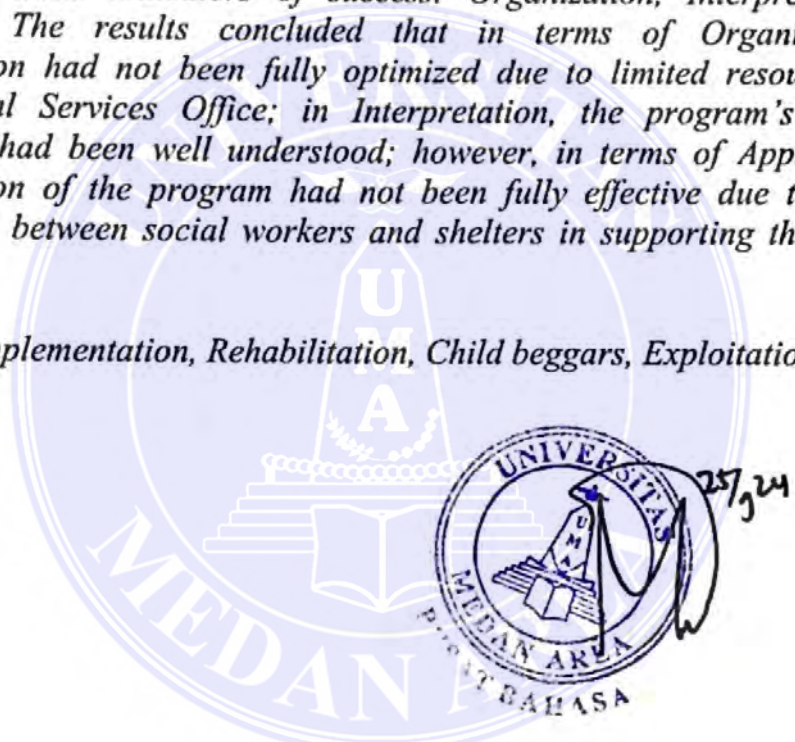
Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Pengemis anak, Eksploitasi



ABSTRACT

Social rehabilitation is a program designed to assist and support individuals or groups in need, particularly aimed at child beggars, in restoring and improving their social welfare. The Social Rehabilitation Program for children should be carried out as effectively as possible by the Social Services Office of Medan to reduce the number of children working as beggars and to promote social welfare for these children and the broader public. The aim of this research was to describe the implementation of the rehabilitation program for underage child beggars (a case study of child exploitation) and to identify the factors that hindered the program. The research used a qualitative descriptive method and applied Charles O. Jones's (1996) Program Implementation theory, which consisted of three indicators of success: Organization, Interpretation, and Application. The results concluded that in terms of Organization, the implementation had not been fully optimized due to limited resources at the Medan Social Services Office; in Interpretation, the program's goals and expectations had been well understood; however, in terms of Application, the implementation of the program had not been fully effective due to a lack of collaboration between social workers and shelters in supporting the program's execution.

Keywords: *Implementation, Rehabilitation, Child beggars, Exploitation*



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Mei 2001 dari Ayah Alm. Abudllah kuddus Parinduri dan Ibu Siti Omas Nasution. Penulis merupakan anak tunggal.

Tahun 2019 penulis Lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pada tahun 2020 penulis terdaftar menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi internal program studi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HIMAP) dan mendapatkan wewenang sebagai Sekretaris Bidang Media dan Informasi (MEDINFO).

Tahun 2022 Penulis Lulus dalam program Kampus Merdeka yaitu Kampus mengajar Batch 4 dan pada tahun 2023 penulis Lulus Beasiswa Bank Indonesia dan tergabung aktif dalam komunitas Generasi Baru Indonesia Sumatera Utara serta mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Divisi Publikasi dan Sosialisasi (PUBSOS) pada Genbi Komisariat UMA periode 2023-2024.

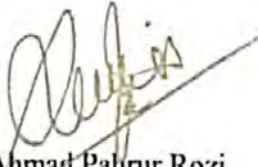
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas khadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ **Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Di Bawah Umur Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur)**” dengan baik.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Si selaku Rektor Universitas Medan Area, Bapak Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M. IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Bapak Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi saya yang membantu saya sampai di tahap ini, Ibu saya tercinta yang telah memberikan segala Hal bagi saya selama ini, dan kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan *Support* kepada penulis untuk berjuang .

Besar harapan penulis semoga penulisan Skripsi ini bisa menambah pengetahuan untuk kepada para pembaca. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan dan penulisan Skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Medan, 28 Juni 2024



Ahmad Pahrur Rozi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Implementasi Kebijakan Publik	9
2.1.1 Definisi Implementasi	9
2.1.2 Model-model Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.2 Program Rehabilitasi Sosial	17
2.3 Pengemis	19
2.3.1 Definisi Pengemis.....	19
2.3.2 Faktor Penyebab Kemunculan Pengemis	20
2.3.3 Karakteristik Pengemis.....	21
2.4 Definisi Anak	22
2.5 Eksploitasi	23
2.5.1 Definisi Eksploitasi	23
2.5.2 Jenis-Jenis Eksploitasi	24
2.5.3 Faktor Munculnya Eksploitasi Anak.....	25
2.5.4 Dampak Eksploitasi Anak.....	26
2.6 Penelitian Terdahulu	26
2.7 Kerangka Pemikiran	30
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Jenis Informan	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4.1 Observasi	36
3.4.2 Wawancara	37
3.4.3 Dokumentasi	38
3.5 Teknik Analisis Data.....	38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil	41
4.1.1 Gambaran Umum Kota Medan.....	41
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Medan	42
4.1.3 Visi, Misi, dan Motto Dinas Sosial Kota Medan.....	43
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan.....	45
4.1.5 Uraian Tugas Dinas Sosial Kota Medan	46
4.1.6 Penyajian Data	52
4.2 Pembahasan	54
4.2.1 Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Di Bawah Umur Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur)	54
4.2.2 Faktor Penghambat program	75
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	80
5.1 Simpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
Lampiran Wawancara	86
Lampiran Surat Izin Penelitian	95
Lampiran Dokumentasi	97
Lampiran Surat Hasil Selesai Riset	103

DAFTAR TABEL

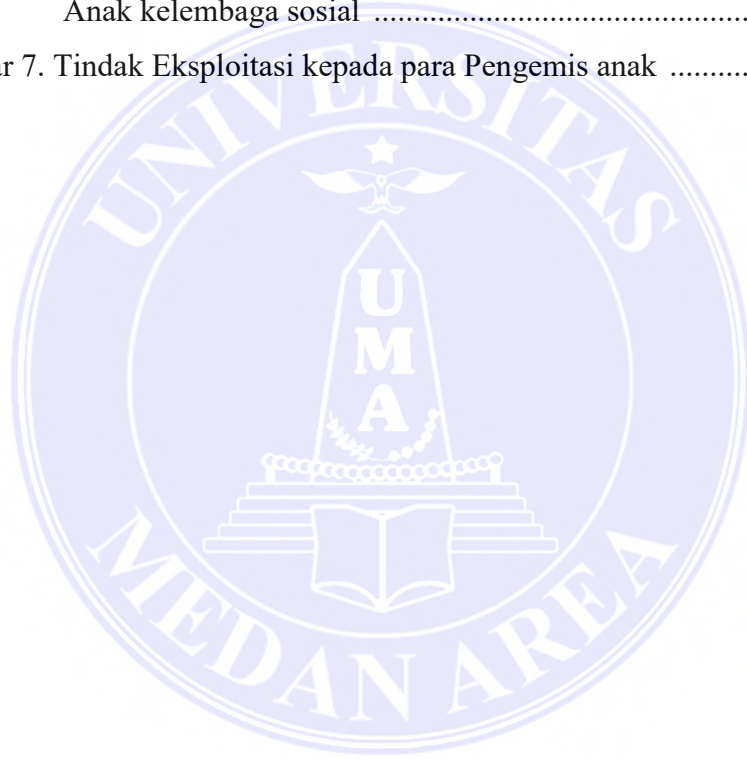
Halaman

Tabel 1. Data Hasil Penertiban Pengemis Golongan Anak-anak	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3. Rincian waktu penelitian	34
Tabel 4. Daftar Informan Penelitian	35
Tabel 5. Fasilitas Dinas Sosial Kota Medan	52
Tabel 6. Data Hasil Penertiban Pengemis Anak	53
Tabel 7. Data Hasil Jumlah Pengemis Anak yang di Rehabilitasi	53



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.	32
Gambar 2. Kantor Dinas Sosial Kota Medan	42
Gambar 3. Petugas URC melakukan penertipan PPKS.....	57
Gambar 4. Formulir <i>Assesment</i>	67
Gambar 5. Surat Jaminan Kesanggupan Orang Tua (khusus Anak dibawah Umur)	69
Gambar 6. Dinas Sosial Kota Medan Menitipkan Anak ke lembaga sosial	72
Gambar 7. Tindak Eksploitasi kepada para Pengemis anak	74



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan suatu proses tahapan yang sangat penting dalam merealisasikan suatu kebijakan publik secara menyeluruh. Implementasi adalah suatu upaya dalam mencapai berbagai tujuan-tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu yang dimana implementasi sendiri adalah manifestasi hal dalam membuat sebuah keputusan yang telah terencana secara terperinci sehingga memiliki tujuan maupun sasaran dalam memenuhi janji-janji serta menyelesaikan sebuah misi yang ingin dicapai, yang akan digunakan terhadap segala kegiatan ataupun praktik sehari-hari dari seorang aktor pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.

Rehabilitasi sosial merupakan sebuah program yang dilakukan dalam membantu dan mendukung individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dalam memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial mereka terkhususnya terhadap para golongan pengemis anak . Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi sosial Anak, menjelaskan bahwa program rehabilitasi sosial merupakan bagian dari pelayanan sosial yang wajib disediakan oleh Negara untuk memenuhi hak anak, bahwa pemenuhan hak anak melalui Rehabilitasi Sosial yang secara sifat, manfaat, dampak negatifnya lintas daerah, Provinsi, dan lintas Negara serta memiliki peranan yang strategis bagi kepentingan nasional yang dilakukan oleh pihak pemerintah .

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Anak, terdapat beberapa ketentuan yang penting untuk diperhatikan. Pasal 3 ayat 4 menyebutkan bahwa Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak dan balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak dapat bekerja sama dengan Dinas Sosial di daerah, lembaga kesejahteraan sosial Anak, dan mitra kerja lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang membutuhkannya. Selanjutnya, pasal 25 ayat 3 menyebutkan bahwa pendampingan sosial dapat melibatkan Pekerja Sosial di Dinas Sosial di daerah, pendamping sosial Anak, dan tenaga profesional lainnya yang mendapatkan supervisi dari Pekerja Sosial balai/loka Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan/atau supervisor satuan bakti Pekerja Sosial. Namun, sayangnya di Kota Medan sendiri masih terdapat banyak kasus pengemis anak yang bekerja dan terjadinya eksploitasi pada anak-anak sebagai pengemis. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial belum mampu sepenuhnya melaksanakan amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Situasi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan memberikan Rehabilitasi Sosial yang sesuai dengan peraturan yang ada. Diharapkan adanya kerjasama antara berbagai pihak, termasuk Dinas Sosial untuk meningkatkan perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi anak-anak yang membutuhkannya. Masih kerap ada khususnya pada Kota Medan sendiri, yang mana pengemis anak dibawah umur tersebut masih marak berada dan ditemui diberbagai tempat umum tampak meminta-minta kepada pengendara dan masyarakat yang berada ditempat umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 mengenai larangan

gelandangan ,pengemisan, serta praktik tuna susila di Kota Medan yang bertujuan sebagai menjaga ketertiban dan keamanan dikota serta melindungi anak-anak dari praktik pengemisan yang berbahaya. Dari Hal tersebut seharusnya praktik-praktik pengemis ini dapat di tangani secara baik oleh pihak pemerintah., dikarenakan praktik-praktik tersebut sudah sampai dilakukan oleh para anak-anak yang masih dibawah usia 18 tahun kebawah.

Berdasarkan Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasannya Undang-Undang ini melarang semua pihak , termasuk orang tua menempatkan , membiarkan , melakukan dan menyuruh atau pun turut serta melakukan Eksploitasi pada anak. Dalam fenomena sosial ini sangat banyak dijumpai di berbagai kota-kota besar di Indonesia khususnya di kota Medan sendiri, maka dari hal tersebut seharusnya pemerintah kota Medan maupun instansi pemerintahan yang memiliki peran serta tanggung jawab dalam menanggulangi fenomena sosial tersebut dapat ditanggulangi agar terciptanya suatu tujuan yaitu keadilan serta kesejahteraan bagi anak-anak yang menjadi pengemis di jalanan.

Dinas Sosial Kota Medan memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi pengemis dalam golongan anak dibawah umur yang mana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta melindungi anak-anak dibawah umur yang terpaksa bekerja menjadi seorang pengemis. Dinas Sosial Melaksanakan fungsi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibidang sosial. Pada kota Medan sendiri Dinas Sosial merupakan suatu lembaga yang

memiliki peran penting dalam melindungi terkhususnya para pengemis anak dibawah umur tersebut pada kota medan.

Permasalahan mengenai pengemis anak ini masih menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan karena ini merupakan suatu hal permasalahan yang cukup kompleks yang mana sudah melibatkan anak-anak bekerja menjadi seorang pengemis di jalanan, maka dari hal itu pemerintah Kota Medan bersama masyarakat bekerja sama dalam menekan laju angka anak-anak yang bekerja di jalanan ini dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan hak mereka sebagai manusia . Terkait dengan fenomena pengemis anak yang masih terjadi di Kota Medan, perlu adanya tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini. Meskipun peraturan telah ada dan memberikan arahan mengenai rehabilitasi sosial anak, namun implementasinya masih belum optimal.

Dalam upaya penanggulangan pengemis khususnya pada pengemis anak dibawah umur sendiri. Dinas Sosial Kota Medan melakukan program Rehabilitasi Sosial, program Rehabilitasi Sosial pada dasarnya memiliki tujuan dalam memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam fenomena ini merujuk terhadap seorang anak yang menjadi seorang pengemis maka sewajarnya program Rehabilitasi Sosial tersebut haruslah dilakukan karena pada program Rehabilitasi Sosial sendiri memiliki layanan yang merujuk terhadap anak yaitu berupa layanan Rehabilitasi sosial Anak yang dimana layanan dari program ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Anak yang bertujuan untuk mencegah hambatan dan

gangguan keberfungsian sosial pada anak dan keluarganya serta mengembangkan keberfungsian sosial anak, keluarga, dan lingkungan sosialnya sehingga memungkinkan anak tumbuh kembang secara optimal.

Berikut jumlah Pengemis berdasarkan kategori Anak-anak di Kota Medan dari tahun ke tahun, menurut data yang diambil melalui data olahan peneliti Dinas Sosial Kota Medan:

Tabel 1. Data Hasil Penertiban Pengemis Golongan Anak-Anak Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah
1.	2019	98 Orang
2.	2020	115 Orang
3.	2021	122 Orang
4.	2022	120 Orang
5.	2023	124 Orang

Sumber : Data Olahan Penelitian di Dinas Sosial Kota Medan, 2024

Berdasarkan uraian diatas yang diambil dari Data Olahan Peneliti dari Dinas Sosial Kota Medan pada tahun 2024, bahwa pengemis anak dibawah umur tersebut mengalami lonjakan yang cukup drastis dari tahun ke tahun, dimulai dari tahun 2019 berjumlah 98 orang , pada tahun 2020 berjumlah 115 orang, dilanjutkan di tahun 2021 meningkat menjadi 122 orang sampai pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 120 orang dan ditahun 2023 mengalami penambahan jumlah 124 orang . Dalam hal ini Dinas Sosial haruslah lebih sigap menanggulangi permasalahan tersebut karena dari data menunjukkan lonjakan terhadap anak-anak yang bekerja sebagai pengemis khususnya di jalan-jalan kota Medan .

Melalui data yang tertera diatas bahwa Dinas Sosial sendiri tidak melakukan penanggulangan secara *responsive* melalui implementasi program sesuai Peraturan yang telah ditentukan. Maka dari hal tersebutlah bagaimana Dinas Sosial mengimplementasikan program Rehabilitasi Sosial dalam mempengaruhi serta menimalisir maupun menekan laju peningkatan anak-anak dibawah umur tersebut menjadi pengemis di jalanan sehingga permasalahan terhadap pengemis dari golongan anak-anak tersebut dapat teratasi untuk melindungi mereka dari tindak Eksploitasi terhadap diri mereka sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan terhadap anak-anak tersebut dalam mendapatkan hak mereka sebagai anak pada umumnya.

Dengan adanya Program Rehabilitasi Sosial melalui layanan program Rehabilitasi Sosial Anak seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam menekan laju tingkat anak yang bekerja sebagai pengemis ini sehingga terciptanya kesejahteraan sosial terhadap anak-anak tersebut maupun lingkup publik. Demi melindungi hak mereka sebagai anak pada umumnya yang harusnya dapat terpenuhi dan mengembalikan fungsi sosial mereka seperti hakikatnya sebagai seorang anak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 mengenai Rehabilitasi Sosial Anak .

Berdasarkan permasalahan diatas , maka dari hal tersebut peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Dibawah Umur Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas , maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur pada Dinas Sosial Kota Medan dalam studi kasus eksploitasi anak dibawah umur ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi program Rehabilitasi Pengemis anak dibawah umur pada Dinas Sosial Kota Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur dalam (studi kasus eksploitasi anak dibawah umur)
2. Mengidentifikasi faktor penghambat apa yang mempengaruhi pelaksanaan program dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam Sebuah penelitian semestinya haruslah memiliki manfaat yang jelas. Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. **Secara Akademik**, yaitu dengan menulis karya ilmiah ini maka dari itu peneliti menginginkan untuk memberikan kontribusi pada

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik mengenai kebijakan publik dalam program Rehabilitasi Pengemis anak dibawah umur dalam memberikan perlindungan anak dan pemberantasan akan eksploitasi pada anak dan menjadikan sebagai refrensi bagi para akademisi dalam memahami bagaimana program Rehabilitasi Pengemis Anak Dibawah umur tersebut dapat mengembalikan fungsi sosialnya sebagai seorang anak dibawah umur dapat. diterapkan serta sebagai bahan refrensi bagi para akademisi dalam memahami untuk meneliti

2. **Secara Praktis**, yaitu dapat memberikan berupa saran ataupun masukan yang bermanfaat bagi Intansi terkait dalam melakukan perbaikan terkait dengan program yang telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 serta mendorong kesadaran publik akan anak-anak yang rentan agar nantinya mendapatkan perlindungan yang lebih baik maupun memberikan hak nya sebagai manusia yang dilahirkan maupun sebagai martabatnya seorang anak pada umumnya .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Implementasi

Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno (2007; 145) Implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang, implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto dan Diyah Ratih Sulistyastuti (2012; 20) implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfil*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam sebuah tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat didalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Menurut Van Meter dan van Horn dalam Winarno (2007; 158) memahami implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Menurut Hill *and* Hupe (2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Menurut Grindle dalam Winarno (2007; 146) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya. Menurut Charles O Jones (1996), implementasi kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari. Namun digunakan dalam menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Dari definisi yang telah dijabarkan oleh para pakar sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu manifestasi hal dalam membuat ataupun melakukan sebuah kebijakan yang telah didasarkan terhadap sebuah keputusan yang telah terencana secara terperinci yang dimana memiliki tujuan maupun sasaran dalam memenuhi janji-janji serta menyelesaikan sebuah misi yang ingin dicapai, yang akan digunakan terhadap segala kegiatan ataupun praktek sehari-hari dari seorang pelaksana kebijakan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya .

2.1.2 Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Mater dan Van Horn dalam Tachjan (2006; 39-40) model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang memengaruhi kebijakan publik yaitu:

1. aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi
2. karakteristik agen pelaksana (implementator)
3. kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana
4. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), mengemukakan bahwa Implementasi adalah upaya dalam melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (*a framework for implementation analysis*). Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel *Independen*, Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2. Variabel *Intervening*, Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan

perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

3. Variabel *Dependen*, Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Charles O Jones (1996), menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu :

1. Organisasi, pembentukan dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
3. Aplikasi (penerapan) berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi berdasarkan teori dari Charles O Jones (1996) menjelaskan implementasi sendiri merupakan suatu proses ataupun serangkaian kegiatan yang bermaksud dalam mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan ketiga aspek penting yaitu, organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi (Penerapan). Yang dimana dimaksud dalam menunjang serta mencapai tujuan dari pengimplementasian program yang ingin dijalankan.

Menurut Gorge Edward III (1980), menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *lack of attention to ivmplementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resource, disposition or attitudes, dan beureucratic structures. communication, resource, disposition or attitudes, dan beureucratic structures*. Dalam pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan berasal implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan Jika komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan serta peraturan implementasi wajib ditrasnmisikan (atau

dikomunikasikan) pada bagian personalia yg sempurna. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan pada masyarakat.

2. Sumber Daya

Adapun indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. *Staff*

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan merupakan staf atau Sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang seringkali terjadi pada implementasi kebijakan yang keliru sautnya ditimbulkan oleh staf yang tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi dibutuhkan pula kecukupan staf menggunakan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan (kompeten dan kapabilitas) pada mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informan

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu:

(1) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan, dan (2) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui

apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi atau perilaku dari pelaksana kebijakan artinya faktor krusial ketiga pada pendekatan tentang pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan namun pula wajib mempunyai kemampuan buat melaksanakannya, sebagai akibatnya pada praktiknya tak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Walaupun asal-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terlaksana karena ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak aman di kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sebagai akibatnya merusak jalannya kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980;7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks implementasinya). Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (*interest affected*).
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*tipe of benefit*).
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*).
4. Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*).
5. Para pelaksana program (*program implementators*).
6. Sumber daya yang dikerahkan (*Resources commited*).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud:

1. Kekuasaan (*power*).
2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involved*).
3. Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristics*).
4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsiveness*).

2.3 Program Rehabilitasi Sosial

Menurut Karnadi dan sudirman (2014:240), rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu “re” yang artinya “kembali” dan “abilitasi” yang berarti kemampuan. Secara tidak langsung maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial merupakan upaya pemulihan yang telah diberikan kepada kliendari gangguan kondisi fisik, psikis, dan sosial, Agar dapat melaksanakannya peran tersebut harus kembali secara baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Program rehabilitasi sosial merupakan suatu program yang bertujuan dalam membantu individu untuk kelompok yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial sekitarnya agar nantinya dapat kembali berfungsi secara sosial dan produktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Anak menjelaskan bahwa Program Rehabilitasi Sosial merupakan bagian dari pelayanan sosial yang wajib disediakan oleh Negara untuk memenuhi hak anak, bahwa pemenuhan hak anak

melalui Rehabilitasi Sosial yang secara sifat, manfaat, dampak negatifnya lintas daerah, Provinsi, dan lintas Negara serta memiliki peranan yang strategis bagi kepentingan nasional yang dilakukan oleh pihak pemerintah .

Program rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial bertujuan untuk membantu para individu meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut,

1. *Outreach*
2. *Homevisiting*
3. *Assesmen*
4. Pendampingan sosial
5. Intervensi
6. Evaluasi
7. Sistem Rujukan
8. Terminasi
9. Reunifikasi

Beberapa layanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial sendiri diantaranya ,

- a. Rehabilitasi Sosial Anak
- b. Lanjut usia terlantar
- c. Disabilitas
- d. Korban kekerasan dan trafficking.

Berdasarkan dari Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan Pasal 26 *Point* (e)

merumuskan penyusunan bahan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial meliputi gelandangan dan pengemis , pekerja seks komersial , bekas warga binaan pemasyarakatan , korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan , tuna sosial serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Dengan sehubungan tugas dan kewenangan dari Dinas Sosial Kota Medan diatas maka seharusnya Dinas Sosial Melaksanakannya secara baik dalam mengimplementasikan Program Rehabilitasi Sosial tersebut secara efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi terkhususnya terhadap anak-anak yang menjadi pengemis dijalan.

2.4 Pengemis

2.4.1 Definisi Pengemis

Menurut Departemen Republik Indonesia (1992), mengemukakan bahwa pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan melalui cara meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara serta alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain .

Definisi pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 mengenai larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan , pengemis adalah seseorang yang mendapatkan sebuah penghasilan dengan melakukan tindakan berupa meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara untuk mengharapkan belas kasihan orang lain . Menurut Keith Hart (2000) mengemukakan bahwa dari kesempatan memperoleh

penghasilan yang sah, pengemis dan gelandangan termasuk pekerja sektor informal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pengemis merupakan orang yang meminta-minta.

Dari definisi diatas maka simpulkan bahwa pengemis merupakan seseorang yang melakukan praktek berupa meminta-minta didepan umum yang dimana bertujuan untuk mendapatkan penghasilan melalui belas kasihan orang-orang disekitarnya, yang dimana praktik meminta-minta ini dapat dilakukan berbagai golongan dari para pengemis mulai dari dewasa, remaja maupun anak-anak terkhususnya yang mana ini merupakan salah satu sebuah fenomena sosial yang memanfaatkan anak-anak dibawah umur sebagai pengemis dijalan dalam mendapat maupun meraup keuntungan dari anak-anak tersebut .

2.4.2 Faktor Penyebab Kemunculan Pengemis

Keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya pengemis terutama di kota-kota besar khususnya dikota Medan sendiri. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan dari para pengemis yang turun kejalan diantaranya:

1. Kemiskinan
2. Faktor Ekonomi
3. Keterbatasan fisik dan Gangguan Mental
4. Kebebasan dan Kesenangan Hidup Menggelandang
5. Faktor Sosial Budaya
6. Keterbatasan Pendidikan dan Keterampilan

Sedangkan menurut Noer Effendi (2004: 114) , munculnya Pengemis jugas dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu :

a. Faktor Internal antara lain,

1. Kurangnya akan bekal pendidikan dan keterampilan
2. Rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, kurang siap untuk hidup dikota besar
3. Sakit jiwa, cacat tubuh

b. Faktor Eksternal antara lain,

1. Gagal dalam mendapatkan pekerjaan
2. Terdesak oleh keadaan, seperti terimpa bencana alam dan perang
3. Pengaruh ataupun interfensi dari orang lain

2.4.3 Karakteristik Pengemis

1. Laki-laki atau perempuan
2. Meminta-minta dirumah penduduk, perkantoran, perempatan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
3. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan , berpura-pura sakit, memberi perintah dan terkadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, dan sumbangan untuk organisasi tertentu.
4. Biasanya memiliki tempat tinggal, berbaur dengan penduduk seperti pada umumnya.

2.5 Definisi Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil belum dewasa. Menurut R.A Kosnan, anak anak merupakan manusia muda dalam kategori umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dimana termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan anak adalah seseorang laki-laki ataupun wanita yang berumur dari 15 tahun. Sedangkan menurut Erikson, E.H. (1968) mendefinisikan bahwa anak adalah individu yang berada dalam tahap perkembangan psikososial dimana mereka sedang mencari identitas mereka dan menghadapi berbagai konflik .

Maka kesimpulannya anak adalah anugerah ataupun keterunan, yang mana anak merupakan individu yang masih kecil atau belum dewasa secara fisik dan umur dimana mereka masih memiliki jiwa yang dapat terpengaruh oleh keadaan lingkungan sekitarnya .

2.6 Eksploitasi

2.6.1 Definisi Eksploitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , eksploitasi adalah pengusahaan , pendayagunaan , atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri atau pemerasan tenaga atas diri orang lain merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Menurut Suharto (2005) Eksploitasi anak merujuk kepada suatu tindakan ataupun sikap diskriminatif terhadap perlakuan secara sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak dalam melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan sebuah perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik , psikis, dan status sosialnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyatakan bahwa perbuatan eksploitasi merupakan perbuatan atau tindakan yang memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak dalam memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, ataupun golongan . Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasannya Undang-Undang ini melarang semua pihak , termasuk orang tua menempatkan , membiarkan , melakukan dan menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan Eksploitasi pada anak .

Menurut Suharto (2005), eksploitasi ialah suatu sikap atau tindakan deskriminatif dalam memberikan perlakuan yang dilakukan atas sewenang-wenang . Menurut Martaja (2005), eksploitasi anak merupakan suatu tindakan

memanfaatkan seseorang dengan secara tidak etnis demi kebaikan atau juga keuntungan pribadi.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penjelasan diatas bahwa eksploitasi merupakan suatu sikap ataupun tindakan memperlak, pendayagunaan, atau pemanfaatan serta memeras terhadap anak yang bertujuan dalam mendapatkan sebuah keuntungan pribadi. Dengan kata lain eksploitasi merupakan suatu tindakan deskriminatif terhadap seorang anak dalam menyuruh dan menggunakan mereka secara sewenang-wenangnya.

2.6.2 Jenis-Jenis Eksploitasi

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi Fisik merupakan penyalahgunaan tenaga dari seorang anak dimana menyuruh mereka dalam bekerja demi keuntungan orang tuanya ataupun orang lain seperti menyuruh mereka untuk bekerja dan mengarahkan anak tersebut kepada sebuah pekerjaan yang semestinya belum dirinya lakukan dalam masa umur yang masih belum tepat seusianya melakukannya.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi Sosial merupakan segala sesuatu hal yang merujuk terhadap terhambatnya suatu perkembangan dari rasa emosional anak.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual merujuk terhadap melibatkan seorang anak dalam aktivitas seksual yang belum dipahaminya. Dalam artian eksploitasi artinya suatu perbuatan yang tidak baik dari orang lain.

4. Eksploitasi Perempuan

Eksploitasi ini merujuk terhadap perbuatan maupun pemanfaatan dari para kaum wanita untuk memperoleh keuntungan bagi kelompok .

2.6.3 Faktor Munculnya Eksploitasi Anak

Tindak kejahatan merupakan suatu masalah sosial yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat dimana seorang pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Terkait dengan sebuah tindak kejahatan yaitu eksploitasi anak yang dilakukan oleh orang tua yang kemudian mengalami peningkatan anak-anak yang dijadikan suatu alat untuk mendapatkan penghasilan (uang), sehingga penanggulangannya tidak hanya cukup memberi hukuman tetapi harus mengetahui faktor-faktor terjadinya eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh pihak orang tua sendiri diantaranya

a. Faktor Internal

1. Faktor Individual
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Keluarga
4. Faktor Pendidikan

b. Faktor Eksternal

1. Faktor Aparat Penegak Hukum
2. Sebagai Akibat pelanggaran Hukum

c. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

d. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai sebuah hasil tindakan , cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2.6.4 Dampak Eksploitasi Anak

Dampak dari tindak kejahatan eksploitasi anak yang dapat terjadi menyebabkan beberapa *Impact* secara umum diantaranya :

1. Anak dapat berbohong , ketakutan, kurang dapat mengenal akan cinta dan kasih sayang serta sulit percaya terhadap orang lain
2. Harga diri anak rendah dan memperlihatkan sikap yang destruktif.
3. Mengalami gangguan akan perkembangan psikologis maupun takut berinteraksi sosial
4. Anak lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan pada temannya
5. Sulit untuk saling membina hubungan dengan orang lain
6. Menyebabkan rasa cemas yang berat , panik, dan depresi (anak mengalami sakit secara fisik serta memiliki masalah terhadap pendidikannya)
7. Mengalami gangguan personality dan mengalami masalah yang cukup kompleks pada saat berusia dewasa

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil survei yang dilakukan oleh peneliterdahulu dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber ilmiah, seperti buku , jurnal, dan skripsi. Peneliti menggunakan beberpa penelitian terdahulu antara lain

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Masriani, 2017	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS ANAK-ANAK PENGEMIS DI KECAMATAN MANDAU)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan anak (Studi Kasus Anak Pengemis di Kecamatan Mandau) belum tepat dan maksimal karena banyak hambatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Hambatannya ada fasilitasnya, Kesatuan pelaku pelayanan kesejahteraan sosial belum maksimal, selain kurangnya komunikasi dengan masyarakat setempat pejabat, dan kurangnya partisipasi dalam hak-hak publik anak dalam keluarga.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Teori Ahli Van Mater dan Van Horn 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian Kualitatif Deskriptif • Mengulas mengenai pengemis anak

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
2.	Muhamad Andi Akbar, 2020	EKSPLOITASI ANAK OLEH ORANGTUA MENJADI PENGEMIS DI YOGYAKARTA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan anak dieksploitsi oleh orangtua menjadi pengemis itu bermacam-macam. Di antara kasus yang terdata adalah terdapat anak yang dipaksa oleh orangtuanya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan arisan. Dalam hal ini bagi orangtua yang menyuruh anaknya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan arisan akan menambah penghasilan untuk membayar cicilan rumah dan arisan dibandingkan mengemis sendirian	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> Metode penelitan kualitati Mengulas mengenai tentang pengemis anak serta eksploitasi anak
3.	Putri Astari, 2023	Implementasi Program Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (GEPENG) Di Dinas Sosial Kota Medan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial kota medan sudah berjalan baik,.	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan Teori Edward III Memasukkan Fokus objek penelitian dari gelandangan Membahas Program Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> Metode penelitan kualitatif Meneliti dan mengulas mengenai fenomena Pengemis Lokasi Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	• Perbedaan Penelitian	Persamaan • Penelitian
			Namun belum maksimal kerana terdapat beberapa hambatan yang dihadapi seperti kurangnya kesadaran gelandangan dan pengemis akan peraturan yang ada , kurangnya tim petugas lapangan dalam penertiban gelandangan dan pengemis tidak adanya rumah perlindungan sosial dalam pembinaan gelandangan dan pengemis		•
4.	Zulfah Matondang, 2022	Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengawasan Dan Pembinaan Pengemis Di Wilayah Kota Medan	hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ada	• Mengulas tentang Peraturan daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang pengawasan dan pembinaan pengemis di wilayah.	• Menggunakan metode penelitian kualitatif • Lokasi penelitian pada Dinas Sosial Kota Medan .

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
				kota medan	
5.	Dwi Ayu Destiani Dkk, 2023	PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK PENGEMIS DI KOTA BAUBA	hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui bahwa masih banyaknya anak pengemis yang memilih kembali ke jalanan untuk mengemis.	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Menggunakan teori Soerjono (2002:221) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Mengulas mengenai pengemis anak

2.8 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019: 379) dirinya mengemukakan bahwa , kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting .

Untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Dalam pencegahan pengemis Anak dibawah umur Pada Dinas Sosial kota Medan (studi kasus eksploitasi anak dibawah umur) maka dengan ini peneliti menggunakan Model Implementasi dari

Charles O Jones (1996) yakni memiliki 3 variable yang mana dapat menukan keberhasilan dari sebuah kebijakan maupun program yang ingin diimplementasikan yakni Organisasi, Interpretasi , dan aplikasi .

1. Organisasi

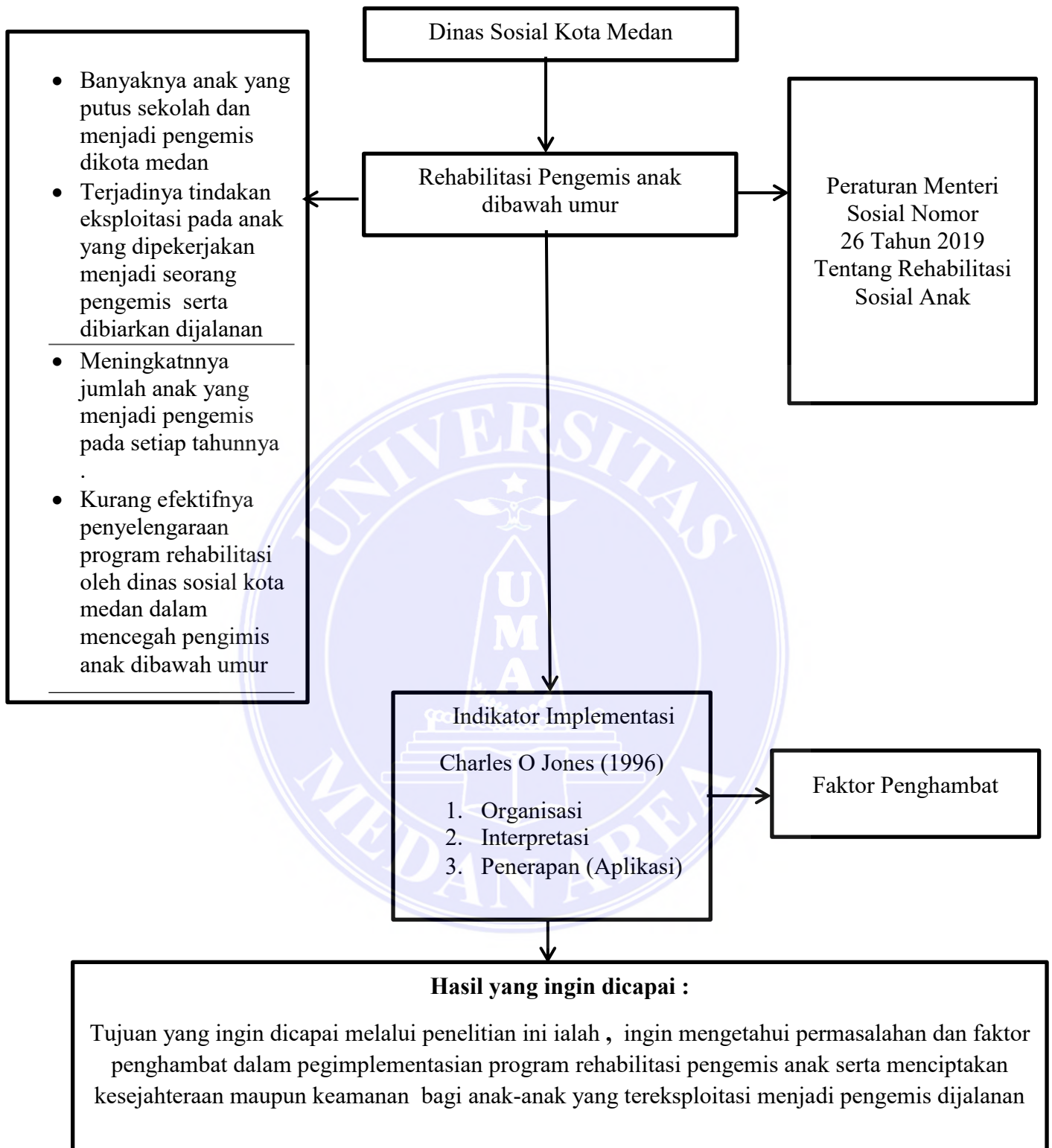
Peneliti ingin melihat bagaimana atau sejauh mana Dinas Sosial Kota Medan Sendiri memiliki struktur organisasi dan Sumber daya yang efektif untuk menunjang pelaksanaan program Rehabilitasi pengemis dibawah umur dalam mengembalikan fungsi sosial serta melindungi mereka dari tindak kejahatan eksploitasi pada anak.

2. Interpretasi

Mencakup bagaimana sebuah organisasi paham terhadap program agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, maka dari hal tersebut peneliti ingin mengetahui serta melihat sejauh mana Dinas Sosial Kota Medan memahami tujuan dan program tersebut .

3. Penerapan (Aplikasi)

Peneliti ingin melihat sebagaimana Dinas Sosial kota Medan dapat menerapkan program tersebut dengan baik dan efektif serta sejauh mana Dinas Sosial dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama pelaksanaan program .



Gambar 1. Kerangka pemikiran
Sumber : Diolah Peneliti 2024

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian “Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Dibawah Umur Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur)” dapat digolongkan sebagai sebuah penelitian deskriptif. Penelitian ini tergolong dalam penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan objek dan sebuah fenomena yang diteliti.

Termasuk didalamnya sebagaimana unsur-unsur yang ada dalam sebuah variable penelitian tersebut berinteraksi satu sama lain dan apa pula produk tersebut berinteraksi yang berlangsung (Siagian, 2011: 52). Penelitian deskriptif digolongkan dalam penelitian yang berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya, kemudian menggambarkan bagaimana adanya dilapangan sehingga pemanfaatan temuan penelitian ini berlaku pada saat itu pula dan kemudian dijelaskan secara narasi berupa kata-kata . Pendekatan penelitian ini sebagai informasi, kontemplasi, dan menyusun dalam satu unit. Dengan demikian penelitian ini ialah hanya menggambarkan bagaimana Implementasi Program Rehabilitasi pengemis Anak Dibawah Umur Pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada kantor Dinas Sosial Kota Medan, Jl. Pinang Baris No. 114 B, Medan. Penelitian tersebut berlangsung mulai bulan Oktober 2023 sampai hingga bulan Mei 2024

Tabel 3. Skema Penyusunan Skripsi 2023-2024

No	Uraian kegiatan	2023				2024					
		Sep	Okt	Nov	Des	Feb	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept
1.	Pengajuan Judul	■									
2.	Penyusunan Proposal	■	■	■							
3.	Seminar Proposal				■						
4.	Perbaikan Proposal					■					
5.	Pengambilan Data Penelitian						■				
6.	Penyusunan Skripsi							■			
7.	Seminar Hasil								■		
8.	Perbaikan Skripsi									■	■
9.	Sidang Meja Hijau										■

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2024

3.3 Jenis Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan disini dimaksudkan ialah yang harus mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan sesuai kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2000: 97). Seorang informan berkewajiban secara sukarela yang mana menjadi anggota tim penelitian walaupun dirinya hanya bersifat informal.

Penelitian Kualitatif dimaksud untuk tidak membuat suatu abstraksi . Oleh hal itu pada sebuah penelitian kualitatif tidak dikenal dengan adanya populasi

maupun sampel. Subjek dari penelitian yang telah tergambar dalam fokus penelitian sebuah penelitian yang telah tercermin dalam suatu fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian disini menjadi sebuah informasi yang akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dalam suatu proses penelitian .

Tabel 4. Jenis Informan

No	URAIAN	JUMLAH INFORMAN	KETERANGAN
1.	Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia diluar Panti atau Lembaga	1 Orang	INFORMAN KUNCI
2.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban Perdagangan / Kepala Tim kerja Rehabilitasi Sosial	1 Orang	INFORMAN UTAMA
3.	Staff Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Medan	2 Orang	INFORMAN PENDUKUNG
4.	Staff Pekerja Sosial UPT pelayanan sosial Gelandangan Pengemis Pemprov Sumut	1 Orang	INFORMAN PENDUKUNG
5.	Pengelola Panti Asuhan Anak Gembira	1 Orang	INFORMAN PENDUKUNG
4.	Pengemis Anak	3 Orang	INFORMAN TAMBAHAN
TOTAL		9 Orang	

Dalam penelitian ini dideskripsikan bahwa ada empat bagian informan dalam memberikan informasi mengenai topik masalah yang diteliti oleh peneliti, yaitu informan kunci , informan utama, informan pendukung, dan informan tambahan.

1. Informan Kunci, ialah mereka yang memiliki dan mengetahui berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian . Informan kunci dalam penelitian ini ialah Ibu Deli Marpaung, SH selaku Kepala Seksi Bidang

Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia diluar Panti atau Lembaga Dinas Sosial Kota Medan yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial dalam pencegahan pengemis anak dibawah umur .

2. Informan Utama, ialah mereka yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan atau program yaitu Bapak Trisno M Hutagalung, SH selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban Perdagangan / Kepala Tim kerja Rehabilitasi Sosial
3. Informan Pendukung, ialah merupakan individu ataupun kelompok yang digunakan sebagai informasi atau sumber data sekunder dalam memberikan suatu gambaran pendukung terhadap data primer yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian . Informan pendukung tersebut ialah Bapak Haspon Winton Simanjorang, S.Kom dan Rini Daulay Staff Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Harun Nurhasyim Harahap Pekerja Sosial UPT pelayanan sosial Gelandangan Pengemis Pemprov Sumut, Ibu E. Nainggolan Pengurus Panti Asuhan Anak Gembira .
4. Informan Tambahan, ialah merupakan individu yang merasakan atau melihat dampak yang dilakukan. Adapun informan tambahan tersebut dalam penelitian ini yaitu, Pengemis anak yang berjumlah 3 orang .

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti, dengan mengamati langsung keadaan di lapangan yaitu berupa gambaran mengenai perilaku, sikap, tindakan maupun keseluruhan dari interaksi yang ada, maka dengan begitu dapat menemui permasalahan terkait dengan topik penelitian.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesain cara merekam wawancara tersebut (Raco, J.R. 2010: 112)

Dapat disimpulkan bahwa proses observasi yang dilakukan nantinya dengan mengamati objek yang hendak diteliti kemudian lokus ataupun tempat penelitian diidentifikasi, dan dilanjutkan dengan melakukan pemetaan sehingga dapat diperoleh berupa gambaran umum mengenai sasaran dari penelitian. Setelah itu peneliti mengelompokkan siapa saja yang akan dijadikan sebagai objek observasi dari penelitian tersebut.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh orang yang melakukan sebuah proses komunikasi secara luring atau langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada sang informan tersebut.

Lexy J. Moleong (1991:135), dengan wawancara dalam metode ini peneliti dan responden (informan) secara langsung (tatap Muka) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian .

Maka dalam teknik wawancara peneliti melakukan proses wawancara secara langsung terhadap para informan yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian untuk memperoleh informasi secara mendalam .

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk sebuah buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011: 169) dalam bukunya Metode Penelitian Adminitrasi, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data dari setiap variable yang diteliti untuk menjawab rumusan masalah

Data-data yang telah diperoleh pada sebuah penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yang mana artinya untuk analisis data tersebut tidak dipergunakan model uji statistik dengan memakai rumus-rumus tertentu, namun melainkan lebih ditujukan sebagai model penelitian deskriptif. Kutipan hasil dari wawancara maupun observasi yang akan ditampilkan serta disajikan dalam mendukung analisis yang disampaikan sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu hal berupa kesimpulan dari hasil penelitian .

Teknik Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis interaktif Miles dan Huberman dalam Anggito & Setiawan (2018: 243-244) yang beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan terjadi yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

menurut Miles & Huberman, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasi data menggunakan cara sedemikian rupa sebagai akibatnya simpulan final bisa ditarik serta diverifikasi. Reduksi data diartikan menjadi proses pemilihan, pemusatan perhatian di penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data “kasar” yang timbul dari catata-catatan tertulis pada lapangan.

2. Penyajian Data

sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan konklusi *riset* dapat dilakukan. pada pelaksanaan penelitian

Miles dan Huberman penyajian data mencakup berbagai jenis seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah bagian berasal suatu kegiatan konfigurasi yang utuh Miles & Huberman (dalam buku Anggito & Setiawan 2018). aktivitas analisis ketiga yang krusial merupakan menarik kesimpulan serta pembuktian.



BAB V **SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dijabarkan melalui hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi program rehabilitasi pengemis anak di bawah umur pada Dinas Sosial Kota Medan belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal dikarenakan pada indikator Organisasi Dinas Sosial Kota Medan masih memiliki keterbatasan akan sumber daya pendukung program baik Sumber daya manusia (SDM) maupun sarana fasilitas pelaksana program sehingga program tersebut belum sepenuhnya berjalan secara maksimal dikarenakan dengan adanya keterbatasan oleh pihak Dinas Sosial Kota Medan, Penerapan (Aplikasi) juga masih belum maksimal terlaksana walaupun hal tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku namun masih lemahnya adanya kolaborasi baik antara pihak Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Medan maupun pihak panti dimana pekerja sosial tidak mendampingi dalam pelaksanaan program. Namun dengan melalui indikator Interpretasi Dinas Sosial Kota Medan secara jelas memahami secara baik dalam tujuan dan harapan dari program tersebut.
2. Faktor Penghambat Implementasi program rehabilitasi pengemis anak di bawah umur pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur), Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Program, Keterbatasan Fasilitas Pendukung Pelaksanaan

Program, Budaya Mengemis Yang Mengakar, Kurangnya Kolaborasi Dengan Pihak Lembaga Yang Lemah.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dan sampaikan terkait dengan Implementasi program rehabilitasi pengemis anak di bawah umur pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi kasus Eksploitasi Anak Di Bawah Umur) yaitu :

1. Dinas Sosial Kota Medan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sarana dan prasarana, sehingga setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak yang maksimal. Dengan SDM yang unggul dan fasilitas yang memadai, upaya pemberdayaan sosial akan lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara luas. Selain itu, percepatan penyelesaian Rumah Perlindungan Sosial (RPS) menjadi langkah penting yang perlu diutamakan, agar program rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, memberikan perlindungan dan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan.
2. Dinas Sosial Kota Medan sebaiknya melakukan peningkatan kolaborasi bersama pihak panti dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut, sehingga dengan adanya kolaborasi serta memonitoring pelaksanaan program serta mendiskusikan program, tantangan, dan solusi. Ini akan membantu membangun hubungan yang lebih baik dan saling memahami kebutuhan masing-masing pihak dan pelaksanaan program dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi kebijakan publik (konsep dan implikasinya di Indonesia)*, Yogyakarta:Gava Media, 2012, hlm. 20
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi:CV Jejak.
- Dian Suluh Kusuma Dewi 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi dan Evaluasi*
- Edwards III, George C. dan Ira Sharkansky (1980), *Implementing public policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Eyestone, Robert. (1971) *The Thread of Policy; A Study in Policy Leadership*. Indianapolis: Bobbs-Merril.
- Grindle, M. (1980:7). *Implementasi Politik dan Kebijakan di Dunia Ketiga*. New Jersey: Pers Universitas Princeton.
- Hill, Michael, Peter Hupe. 2002. *Menerapkan Kebijakan Publik: Tata Kelola dalam Teori dan Praktek*. London-Thousand Oak-New Delhi: Publikasi Sage
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan dari buku: *An Introduction to The Study of Public Policy*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi Offset.
- Mazmania n, DH dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementasi dan Kebijakan Publik*.Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementasi dan Kebijakan Publik*, New York: HarperCollins.
- Moleong, Lexy. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mustari, N., & IP, S. (2015). *KEBIJAKAN PUBLIK*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Musanef, 1991. "Manajemen Kepegawaian di Indonesai", Gunung Agung, Universitas Michigan. Hidayat, S. 1979. "Pembinaan Perkotaan di Indonesia", Bina Askara, Bandung.
- Purwanto Agus, Erwan (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Purwono Sanstoso dan Joash Tapiheru, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung : Sumur, 2005), hal. 113.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat*,. Bandung: Refika Aditama
- Winarno, Budi (2007) *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Buku Kita

JURNAL & SKRIPSI

- Afra, N. (2020). *Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis Anak ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, UIN Matondang,
- Akbar, M. A. (2020). *Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Perspektif Sosiologi Hukum*.
- Astari, P. (2023). *Implementasi Program Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Dinas Sosial Kota Medan*.
- Dahlan, D. (2022). *FENOMENA PENGEMIS ANAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI POLITIK*. *Jurnal Suara Politik*, 1(1).
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104-109.
- Destiani, D. A., Nastia, N., & Basir, M. A. (2023). *PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP PENANGGULANGAN ANAK PENGEMIS DI KOTA BAUBAU*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(3), 555-564.
- Effendi, Tajjudin Noer. 2004. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta : TiaraWacana.
- Erickson, E.H. 1968. *Identity: Youth and Crisis*. New York: Horton.
- Hart, Keith. *Intimations of Keith Hart's "Informal Economy" - In the Work of Henry Mayhew, P T Bauer and Richard Salisbury*.

- Hadi, A. (2015). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002. *Ummul Qura*, 5(1), 72-84.
- Herdiana, D. (2018). *Sosialisasi Kebijakan Publik :Pengertian Dan Konsep Dasar*: Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik.
- Karnadi, dan Sadiman Al-Kundarto. "Model Rehabilitasi Sosial Gelandangan Psikotik berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Ponpes Panti REHSOS Nurussalam Sayung Demak)." *Jurnal at-Taqaddum* 6, No.2 (2014): 236-264.
- Khibran, M. F., Hasni, H., Kadir, R., Syukur, M., & Ahmad, M. R. S. (2023). Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis di Lampu Merah di Kota Makassar. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 164-171.
- Latifah, U. MOTIF PENGEMIS ANAK "AWE-AWE" DI JALAN RAYA GUMITIR DESA KALIBARUMANIS KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI.
- Martaja.(2005). Strategi Gebrakan Atasi Kemiskinan. Bappenas
- Masriani, M., & Sujianto, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-anak Pengemis di Kecamatan Mandau)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Muhajir, M. R., & Ritonga, F. U. (2023). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Rehabilitasi Sosial Di Dinas Sosial Kota Medan. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 3(1), 291-297.
- Muslim, M. (2013). Penanggulangan pengemis dan gelandangan di Kota Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 24-35.
- Novalina, D. (2018). *Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Waleleng, G. J., & Pratiknjo, M. (2023). Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 19(1), 717-726.
- ZAKARIA, A. (2023). *Ekploitasi Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tua Sebagai Pengemis Jalanan di Kota Mataram* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Z. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pengemis di Wilayah Kota Medan* (Doctoral dissertation).AR-RANIRY).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat (1) Huruf b, tentang Mengatur Hak dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, Tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019, Tentang Rehabilitasi Sosial Anak

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003, Tentang mengatur gelandangan dan pengemis serta praktek susila di Kota Medan .

Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan ,Fungsi Dinas Sosial Kota Medan Pasal 26 *Point (e)*



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS ANAK
DIBAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
(STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR)**

I. IDENTITAS INFORMAN I (INFORMAN KUNCI)

- Nama : Deli Marpaung, SH
- Jenis kelamin : Perempuan
- Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Diluar Panti dan atau Lembaga

NO.	DIMENSI/INDIKATOR	PERTANYAAN	KATEGORI INFORMAN
1.	ORGANISASI	1. Bagaimana Struktur pelaksana program Rehabilitasi Sosial pada Pengemis anak dibawah umur pada Dinas Sosial Kota Medan sendiri ? 2. Apa peran dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan program rehabilitasi tersebut? 3. Apa saja kesiapan dan jumlah SDM dalam pelaksanaan program tersebut? 4. Apa saja kelengkapan atau pendukung dalam pelaksanaan program tersebut?	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA DILUAR PANTI DAN ATAU LEMBAGA
2.	INTERPRETASI	1. Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu tentang peran program rehabilitasi sosial terhadap para Pengemis Anak tersebut? 2. Apa yang menjadi tujuan utama dari program rehabilitasi ini menurut pandangan Bapak/ibu sebagai kepala dinas sosial kota medan terkait dengan mengatasi serta menimalisir para pengemis	

		<p>anak yang bekerja dan terkena eksploitasi pada dirinya?</p> <p>3. Bagaimana Dinas Sosial Kota Medan mengidentifikasi dan menangani factor resiko eksploitasi anak dibawah umur dalam program rehabilitasi tersebut?</p>	
3.	PENERAPAN (APLIKASI)	<p>1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Medan Menerapkan Program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur dalam praktiknya?</p> <p>2. Apakah dalam penerapan program tersebut Dinas Sosial Kota medan sendiri bekerja sama dalam penanganan pengemis anak dibawah umur tersebut?</p>	

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS ANAK DIBAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN (STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR)

II. IDENTITAS INFORMAN II (INFORMAN UTAMA)

- Nama : Trisno M Hutagalung, SH
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Dan Kepala Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial

NO.	DIMENSI/INDIKATOR	PERTANYAAN	KATEGORI INFORMAN
1.	ORGANISASI	<p>1. Bagaimana Struktur pelaksana program Rehabilitasi Sosial pada Pengemis anak dibawah umur pada Dinas Sosial Kota Medan sendiri ?</p> <p>2. Sejauh Mana Bapak/Ibu Sebagai kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, mengelola alur kerja dalam organisasi dalam memastikan implementasi program berjalan efisien sesuai dengan peraturan menteri nomor 26 tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Anak</p> <p>3. Apa saja kesiapan dan jumlah SDM dalam pelaksanaan program tersebut dialokasikan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur ?</p>	<p>KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN DAN KEPALA TIM KERJA BIDANG REHABILITASI SOSIAL</p>

		<p>4. Apa saja kelengkapan atau pendukung dalam pelaksanaan program tersebut?</p> <p>5. Bagaimana peran dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam mengawasi dan memastikan kelancaran dalam mengimplementasikan Program tersebut?</p>	
<p>2.</p>	<p>INTERPRETASI</p>	<p>1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kondisi eksploitasi anak dibawah umur dikota medan ? dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendekatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan Sendiri?</p> <p>2. Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu tentang peran program rehabilitasi sosial terhadap para Pengemis Anak tersebut?</p> <p>3. Apa yang menjadi tujuan utama dari program rehabilitasi ini menurut pandangan Bapak/ibu sebagai kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada dinas sosial kota medan terkait dengan mengatasi serta menimalisir para pengemis anak yang bekerja dan terkena eksploitasi pada dirinya?</p> <p>4. Sejauhmana pemahaman Bapak/Ibu terkait dengan konsep Rehabilitasi Sosial anak terhadap pengemis anak dibawah umur dalam</p>	

		<p>Dinas Sosial sendiri mencakup aspek perlindungan hak-hak anak ?</p> <p>5. Bagaimana Bidang rehabilitasi sosial memahami secara mendalam kebutuhan khusus bagi anak-anak dibawah umur tersebut menjadi sasaran program ? dan sejauhmana interpretasi ini didorong dalam menimalisasi dampak negative dan penanganan masalah pada akar permasalahan?</p>	
<p>3.</p>	<p>PENERAPAN (APLIKASI)</p>	<p>1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Medan Menerapkan Program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur dalam praktiknya?</p> <p>2. Apakah dalam penerapan program tersebut Dinas Sosial Kota medan sendiri bekerja sama dalam penanganan pengemis anak dibawah umur tersebut?</p> <p>3. Apakah dalam pelaksanaan program memiliki factor penghambat dalam praktik penerapan program secara langsung?</p> <p>4. Faktor pendukung apa saja yang ada dalam penerapan program?</p>	

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS ANAK
DIBAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
(STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR)**

III. IDENTITAS INFORMAN III (INFORMAN PENDUKUNG)

- Nama : Haspon Winton Simanjorang, S.Kom
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Jabatan : Staff Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial

NO.	DIMENSI/INDIKATOR	PERTANYAAN	KATEGORI INFORMAN
1.	ORGANISASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan program rehabilitasi tersebut? 2. Apa saja kesiapan dan jumlah SDM dalam pelaksanaan program tersebut? 3. Apa saja kelengkapan atau pendukung dalam pelaksanaan program tersebut? 4. Bagaimana peran dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam mengawasi dan memastikan kelancaran dalam mengimplementasikan Program tersebut? 	<p>STAFF PEKSOS BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA MEDAN</p>
2.	INTERPRETASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kondisi eksploitasi anak dibawah umur dikota medan ? dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendekatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan Sendiri? 	

		<p>2. Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu tentang peran program rehabilitasi sosial terhadap para Pengemis Anak tersebut?</p> <p>3. Apa yang menjadi tujuan utama dari program rehabilitasi ini menurut pandangan Bapak/ibu sebagai kepala dinas sosial kota medan terkait dengan mengatasi serta menimalisir para pengemis anak yang bekerja dan terkena eksploitasi pada dirinya?</p>	
3.	PENERAPAN (APLIKASI)	1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Medan Menerapkan Program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur dalam praktiknya?	

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENGEMIS ANAK
DIBAWAH UMUR PADA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
(STUDI KASUS EKSPLOITASI ANAK DIBAWAH UMUR)**

IV. IDENTITAS INFORMAN III (INFORMAN PENDUKUNG)

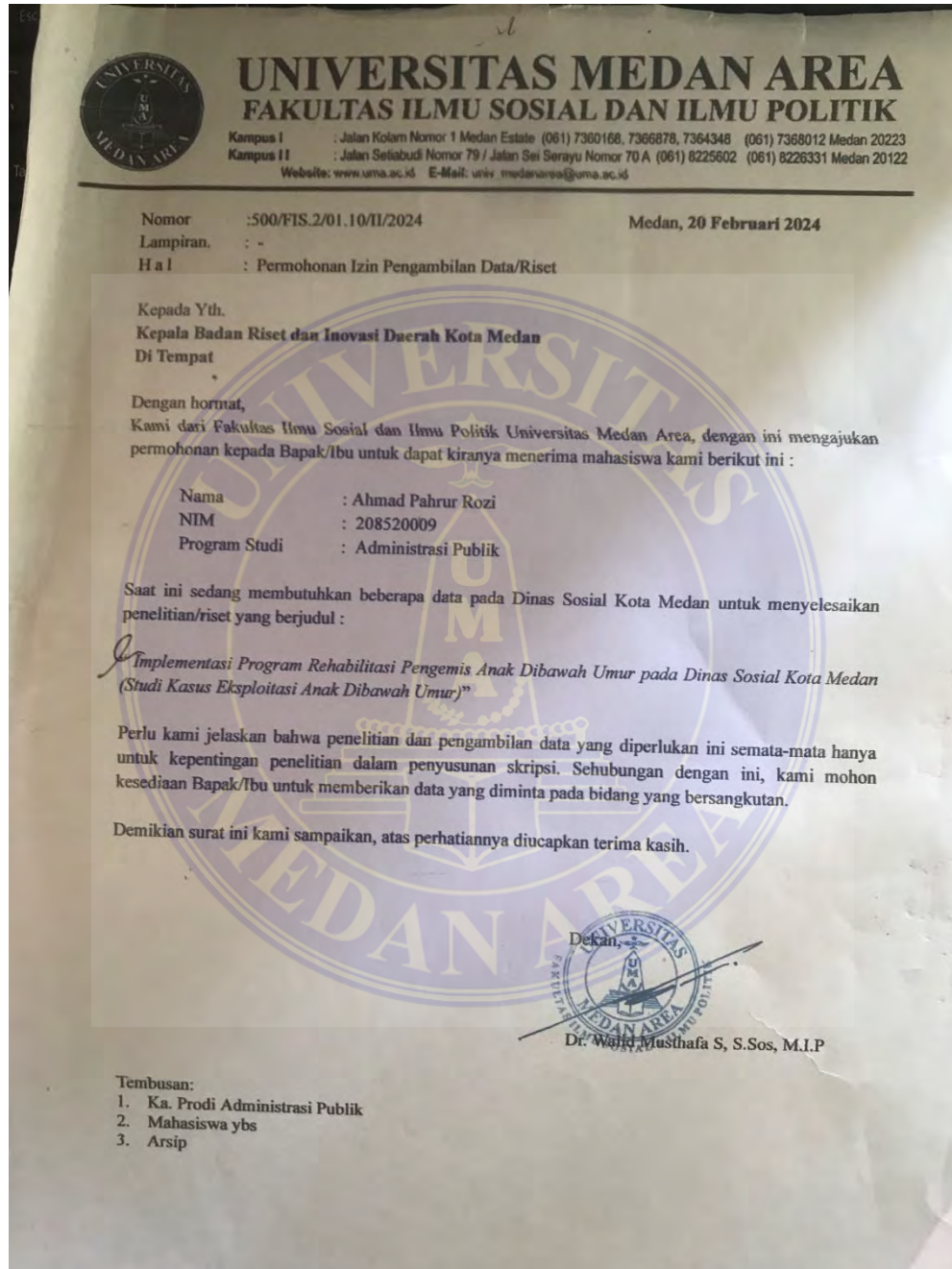
- Nama : Rini Daulay
- Jenis kelamin : Perempuan
- Jabatan : Staff Pekerja Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial

NO.	DIMENSI/INDIKATOR	PERTANYAAN	KATEGORI INFORMAN
1.	ORGANISASI	1. Apa peran dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam mengimplementasikan program rehabilitasi tersebut? 2. Apa saja kesiapan dan jumlah SDM dalam pelaksanaan program tersebut? 3. Apa saja kelengkapan atau pendukung dalam pelaksanaan program tersebut? 4. Bagaimana peran dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam mengawasi dan memastikan kelancaran dalam mengimplementasikan Program tersebut?	<p style="text-align: center;">STAFF PEKSOS BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA MEDAN</p>
2.	INTERPRETASI	1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang kondisi eksploitasi anak dibawah umur dikota medan ? dan bagaimana hal ini mempengaruhi pendekatan rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan Sendiri?	

		<p>2. Bagaimana Pemahaman Bapak/Ibu tentang peran program rehabilitasi sosial terhadap para Pengemis Anak tersebut?</p> <p>3. Apa yang menjadi tujuan utama dari program rehabilitasi ini menurut pandangan Bapak/ibu sebagai kepala dinas sosial kota medan terkait dengan mengatasi serta menimalisir para pengemis anak yang bekerja dan terkena eksploitasi pada dirinya?</p>	
3.	PENERAPAN (APLIKASI)	<p>1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Medan Menerapkan Program Rehabilitasi pengemis anak dibawah umur dalam praktiknya?</p>	

LAMPIRAN V

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 500/FIS.2/01.10/II/2024 Medan, 20 Februari 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ahmad Pahrur Rozi
NIM : 208520009
Program Studi : Administrasi Publik

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Dinas Sosial Kota Medan untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Dibawah Umur pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur)

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,
Dr. Waid Musthafa S, S.Sos, M.I.P.

Tembusan:
1. Ka. Prodi Administrasi Publik
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

LAMPIRAN VI

SURAT IZIN PENELITIAN

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara 20143.
Telepon (061) 7873439, Faksimile (061) 7873144
Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 000.9/0539

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MEMIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 500/FIS.2/01.10/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 Perihal Pemohonan Izin Pengambilan Data/Riset.

NAMA : Ahmad Pahrur Rozi
NIM : 208520009
PROGRAM STUDI : Administrasi Publik
LOKASI : Dinas Sosial Kota Medan.
JUDUL : "Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Dibawah Umur pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur)."


LAMANYA : 3 (tiga) Bulan.
PENANGGUNG JAWAB : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada Pimpinan Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak Dibenarkan Melakukan Riset atau Aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan Ketentuan atau Peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan,

Mansuryah, S, Sos, M. AP
Pembina Tk. I (I/b)
NIP 196805091989091001

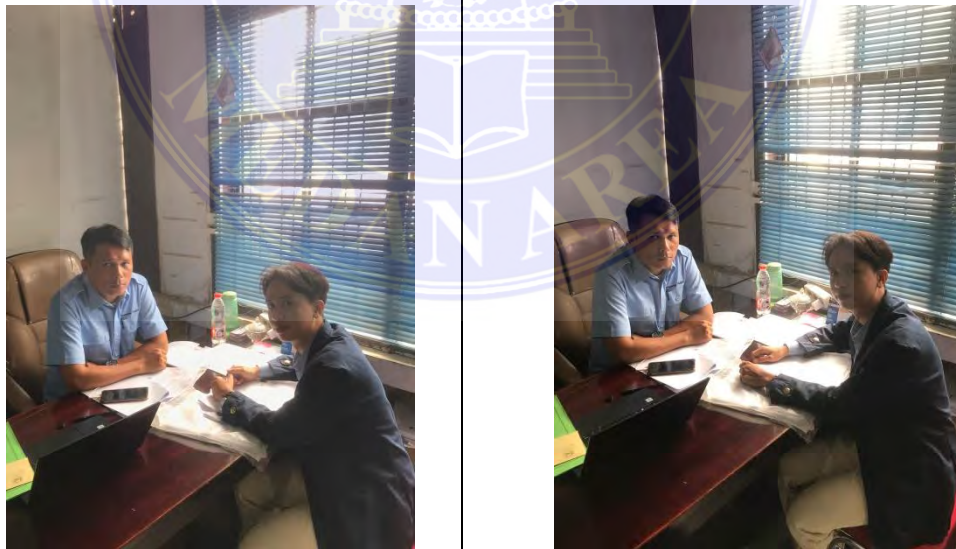
Tembusan :
1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Sosial Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

LAMPIRAN VII

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Informan Kunci yaitu Ibu Deli Marpaung, SH Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan dan Lanjut Usia diluar panti dan Lembaga



Wawancara Bersama Informan Utama yaitu Bapak Trisno M Hutagalung, SH Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan korban Perdagangan dan Kepala Tim kerja Bidang Rehabilitasi Sosial

LAMPIRAN VIII

DOKUMENTASI



Wawancara Bersasama Informan Pendukung yaitu Bapak Haspon Winton Simanjorang, S.Kom Selaku Staff Pekerja Sosial (PEKSOS) Bidang Rehabilitasi Sosial



Wawancara Bersasama Informan Pendukung yaitu Rini Daulay Selaku Staff Pekerja Sosial (PEKSOS) Bidang Rehabilitasi Sosial

LAMPIRAN IX

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Pengemis Anak dibawah umur yaitu Kaila (9) Tahun pengemis anak di Jl. Wahidin Medan



Wawancara dengan Pengemis anak dibawah umur putra pasaribu (11) Tahun pengemis anak di Jl. Aksara Medan



Wawancara dengan Pengemis anak dibawah umur Debby (8) Tahun pengemis anak di Jl. Aksara Medan

LAMPIRAN X

DOKUMENTASI



Dokumentasi Praktik Mengemis Yang Dilakukan Oleh Pengemis Anak Dibawah
Umur Di Jalan.

LAMPIRAN XI

DOKUMENTASI



LAMPIRAN XII

DOKUMENTASI



Dokumentasi Panti Asuhan Anak Gembira tempat pelaksanaan program serta rujukan berlokasi di salingkar



Dokumentasi Bersama Ibu E Nainggolan sebagai Pengelola Panti Asuhan Anak Gembira

LAMPIRAN XIII

DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Pihak Pekerja Sosial pada UPT Pelayanan Gelandangan pengemis Pemprov Sumut

LAMPIRAN XIV

SURAT HASIL RISET



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS SOSIAL

Jalan Pinang Baris No.114-B Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Laman dissos@pemkomedan.go.id, Pos-el dinsosmedan@gmail.com

Medan, 09 Juli 2024

Nomor : 000.9.1/1166
Lampiran : -
Perihal : Penyampain Pelaksanaan Riset

Kepada Yth,
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor.000.9/0539/ tanggal 13 Maret 2024 tentang Surat Rekomendasi Riset an. Ahmad Pahrur Rozi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Ahmad Pahrur Rozi
NIM : 208520009
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
Judul : Implementasi Program Rehabilitasi Pengemis Anak Dibawah Umur pada Dinas Sosial Kota Medan (Studi Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur)

Telah melaksanakan riset pada tanggal 28 Mei 2024 di Dinas Sosial Kota Medan

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas
Sosial,

Khoiruddin, S Sos, SE, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197011171990071001